LAPORAN

EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM KUPON BBM

DISUSUN OLEH:

RYAN ADI SAPUTRA

NIP. 200005272025061011

NOMOR ABSEN 23

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan **Laporan Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Evaluasi Implementasi Sistem Kupon BBM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat** dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi terhadap penerapan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan proses kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Kupon BBM telah memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keteraturan pengelolaan administrasi kupon BBM melalui proses digitalisasi.

Melalui laporan evaluasi ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai kondisi implementasi sistem saat ini, manfaat yang telah diperoleh, kendala yang masih ditemukan, serta rekomendasi pengembangan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penerapan sistem di masa mendatang.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kontribusi dalam proses implementasi maupun evaluasi Sistem Kupon BBM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas penerapan teknologi informasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi serta pengembangan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis digital melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Mataram, 26 Agustus 2026

Penyusun,

Ryan Adi Saputra
NIP. 200005272025061011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Maksud dan Tujuan 5
1.3 Ruang Lingkup 5
1.4 Dasar Hukum 6
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 7
2.1 Gambaran Umum Implementasi Sistem 7
2.2 Kondisi Sebelum Implementasi Sistem 7
2.3 Kondisi Setelah Implementasi Sistem 7
2.4 Tahapan Pelaksanaan 8
BAB III EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE 9
3.1 Metode Evaluasi Implementasi SPBE 9
3.2 Evaluasi Transformasi Proses Bisnis 9
3.3 Evaluasi Tata Kelola Data dan Informasi 10
3.4 Evaluasi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 11
3.5 3.5 Evaluasi Keamanan dan Pengendalian Sistem 12
3.6 Evaluasi Efektivitas dan Dampak Implementasi 13
3.7 Gap Analysis Implementasi Sistem Kupon BBM 13
3.8 Hasil Evaluasi Implementasi SPBE 14
BAB IV KESIMPULAN 15
BAB V REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT 16
BAB VI PENUTUP 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses kerja pemerintahan. Melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), instansi pemerintah didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Salah satu bentuk implementasi digitalisasi proses kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat adalah penerapan Sistem Kupon BBM. Sistem ini dikembangkan sebagai solusi terhadap permasalahan administrasi pengelolaan kupon BBM yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.

Sebelum implementasi sistem, proses pengambilan dan penggunaan kupon BBM belum memiliki pencatatan digital yang terintegrasi. Pengelolaan administrasi masih bergantung pada catatan manual yang dilakukan oleh pegawai pengelola keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan kesulitan dalam mengetahui riwayat pengambilan kupon, status penggunaan kupon, serta proses pertanggungjawaban kupon yang telah diberikan kepada pegawai. Permasalahan utama yang muncul dari proses manual tersebut antara lain:

a. Belum tersedianya sistem pencatatan transaksi kupon BBM secara terpusat.
b. Kesulitan dalam melakukan monitoring kupon yang telah diambil namun belum digunakan.
c. Risiko kesalahan pencatatan administrasi.
d. Kesulitan dalam melakukan penelusuran bukti penggunaan kupon.
e. Membutuhkan waktu lebih lama dalam proses pemeriksaan dan rekonsiliasi data.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, dikembangkan Sistem Kupon BBM berbasis web yang mampu mengelola proses pengambilan kupon, penggunaan kupon, pengelolaan stok, dokumentasi bukti penggunaan, serta monitoring pertanggungjawaban kupon.

Implementasi sistem ini menjadi salah satu bentuk penerapan SPBE pada tingkat unit kerja melalui digitalisasi proses administrasi internal. Evaluasi terhadap sistem diperlukan untuk mengetahui sejauh mana sistem telah memberikan manfaat terhadap efektivitas pekerjaan, mengidentifikasi kesenjangan yang masih ada, serta menyusun rekomendasi pengembangan agar sistem dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Evaluasi Implementasi Sistem Kupon BBM pada Kanwil Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap penerapan sistem digital dalam mendukung proses administrasi pengelolaan kupon BBM serta melihat kontribusinya terhadap peningkatan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas proses kerja.

1.2.2. Tujuan

Tujuan pelaksanaan evaluasi ini adalah:

a. Mengetahui kondisi pengelolaan kupon BBM sebelum dan setelah penerapan sistem digital.
b. Mengidentifikasi manfaat implementasi Sistem Kupon BBM terhadap proses administrasi.
c. Mengevaluasi kesesuaian sistem dengan prinsip digitalisasi proses kerja dalam SPBE.
d. Mengidentifikasi kendala dan kesenjangan implementasi sistem.
e. Menyusun rekomendasi pengembangan dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan sistem.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi dalam laporan ini mencakup pelaksanaan dan penerapan Sistem Kupon BBM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat sebagai bentuk digitalisasi proses kerja dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Evaluasi difokuskan pada beberapa aspek, yaitu:

1. **Kondisi pengelolaan kupon BBM sebelum dan setelah implementasi sistem**, meliputi perubahan proses dari mekanisme manual menjadi berbasis elektronik.

2. **Implementasi Sistem Kupon BBM**, meliputi proses pengambilan kupon, penggunaan kupon untuk pengisian BBM, pengelolaan stok, serta monitoring dan pertanggungjawaban kupon.

3. **Evaluasi efektivitas sistem**, meliputi manfaat yang diperoleh, kendala yang ditemukan, serta dampak penerapan sistem terhadap efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan kupon BBM.

4. **Rekomendasi pengembangan sistem**, sebagai bahan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Kupon BBM di masa mendatang.

1.4 Dasar Hukum

a. Pelaksanaan evaluasi implementasi Sistem Kupon BBM mengacu pada beberapa regulasi terkait penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, antara lain:

b. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Gambaran Umum Implementasi Sistem

Sistem Kupon BBM merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk mendukung pengelolaan distribusi, penggunaan, dan monitoring kupon BBM secara digital.

Sistem menyediakan dua layanan utama bagi pengguna, yaitu:

a. Form Pengambilan Kupon BBM.
b. Form Pengisian BBM.

Selain layanan pengguna, sistem menyediakan panel operator untuk melakukan pengelolaan administrasi, monitoring transaksi, pengelolaan stok, dan pengawasan pertanggungjawaban kupon.

2.2 Kondisi Sebelum Implementasi Sistem

Sebelum sistem diterapkan, proses pengelolaan kupon BBM masih dilakukan secara manual. Pencatatan dilakukan berdasarkan catatan pribadi pegawai pengelola sehingga memiliki beberapa keterbatasan:

a. Data transaksi belum tersimpan dalam satu sistem;

b. Riwayat penggunaan kupon sulit ditelusuri;

c. Monitoring kupon yang belum digunakan membutuhkan pemeriksaan manual;

d. Proses pencocokan data membutuhkan waktu lebih lama.

Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi belum berjalan secara optimal dari sisi efisiensi dan pengawasan.

2.3 Kondisi Setelah Implementasi Sistem

Setelah implementasi Sistem Kupon BBM, seluruh proses utama telah terdigitalisasi.Perubahan yang terjadi antara lain:

Aspek	Sebelum Sistem	Setelah Sistem
Pencatatan transaksi	Manual	Digital dan tersimpan dalam database
Identifikasi pengguna	Berdasarkan catatan	Validasi NIP

Bukti penggunaan	Tidak terintegrasi	Upload foto dengan timestamp
Monitoring stok	Manual	Dashboard stok kupon
Monitoring pertanggungjawaban	Pemeriksaan manual	Monitoring kupon belum diisi
Rekonsiliasi	Membutuhkan pencarian manual	Berdasarkan data transaksi

2.4 Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan penggunaan sistem terdiri atas:

1. Pengambilan Kupon

Pegawai mengakses aplikasi, memilih layanan pengambilan kupon, kemudian mengisi data kebutuhan.

Sistem melakukan validasi:

a. Identitas Pegawai;
b. Kendaraan;
c. Jenis Bbm;
d. Ketersediaan Stok.

Apabila validasi berhasil, sistem membuat transaksi pengambilan dan mengurangi stok secara otomatis.

2. Penggunaan Kupon

Pegawai melakukan pengisian BBM menggunakan kode serah atau transaksi pengambilan yang tersedia.Setelah pengisian selesai, pengguna mengunggah bukti penggunaan berupa foto dengan timestamp.

3. Monitoring Operator

Operator melakukan pengawasan melalui panel operator yang menyediakan:

a. daftar dokumen;
b. riwayat stok;
c. foto bukti penggunaan;
d. daftar kupon belum dipertanggungjawabkan;
e. fitur rekonsiliasi.

BAB III
EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE

3.1 Metode Evaluasi Implementasi SPBE

Evaluasi implementasi Sistem Kupon BBM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan teknologi informasi telah memberikan perubahan terhadap proses pengelolaan kupon BBM, khususnya dalam mendukung efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses kerja.

Evaluasi dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengamatan terhadap proses bisnis yang berjalan, penggunaan sistem oleh pengguna, dokumentasi fitur aplikasi, serta analisis terhadap perubahan kondisi sebelum dan setelah implementasi sistem.

Aspek evaluasi yang digunakan dalam laporan ini meliputi:

1. **Transformasi proses bisnis**, untuk melihat perubahan mekanisme kerja dari proses manual menjadi berbasis elektronik.
2. **Tata kelola data dan informasi**, untuk menilai pengelolaan data transaksi, dokumentasi, serta ketersediaan informasi sebagai bahan monitoring.
3. **Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik**, untuk melihat kemudahan dan efektivitas layanan internal yang diberikan sistem kepada pengguna.
4. **Keamanan dan pengendalian sistem**, untuk menilai mekanisme pengamanan dasar dalam mendukung keandalan pengelolaan data.
5. **Efektivitas dan dampak implementasi**, untuk mengetahui manfaat yang diperoleh organisasi setelah sistem diterapkan.

Melalui evaluasi tersebut, dapat diketahui tingkat keberhasilan implementasi Sistem Kupon BBM sekaligus mengidentifikasi area yang masih membutuhkan pengembangan.

3.2 Evaluasi Transformasi Proses Bisnis

Salah satu tujuan utama penerapan SPBE adalah melakukan transformasi proses kerja dari mekanisme manual menjadi proses berbasis elektronik yang lebih efektif dan terdokumentasi.

Sebelum implementasi Sistem Kupon BBM, proses pengelolaan kupon BBM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat masih dilakukan secara manual. Pencatatan pengambilan kupon dan penggunaan kupon masih bergantung pada catatan administrasi yang dilakukan oleh pegawai pengelola. Kondisi tersebut menyebabkan proses

penelusuran transaksi menjadi lebih sulit karena belum terdapat sistem pencatatan terpusat yang mampu menyimpan riwayat penggunaan kupon secara sistematis.

Permasalahan utama dari proses manual tersebut adalah kesulitan dalam mengetahui apakah kupon yang telah diberikan kepada pegawai sudah digunakan atau masih menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan. Selain itu, proses pemeriksaan administrasi membutuhkan waktu lebih lama karena data harus dicocokkan berdasarkan catatan yang tersedia.

Setelah implementasi Sistem Kupon BBM, proses bisnis tersebut mengalami perubahan melalui digitalisasi alur kerja. Pengambilan kupon dilakukan melalui sistem dengan mekanisme validasi identitas pegawai menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP), pencatatan kendaraan, jenis BBM, jumlah kupon, serta pembuatan kode serah sebagai identitas transaksi.

Pada proses penggunaan kupon, sistem menyediakan mekanisme validasi transaksi berdasarkan kode serah atau data pengambilan sebelumnya. Pengguna juga dapat mengunggah bukti penggunaan BBM berupa foto dengan timestamp sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban.

Dari hasil evaluasi, implementasi sistem telah berhasil melakukan transformasi proses administrasi yang sebelumnya bersifat manual menjadi proses digital yang lebih terstruktur. Sistem telah mampu mengurangi ketergantungan terhadap pencatatan manual serta meningkatkan kemudahan dalam melakukan penelusuran transaksi.

Namun demikian, proses bisnis masih dapat dikembangkan lebih lanjut melalui integrasi dengan sistem pendukung lainnya agar proses administrasi dapat berjalan semakin otomatis.

3.3 Evaluasi Tata Kelola Data dan Informasi

Data merupakan salah satu komponen penting dalam penerapan SPBE karena menjadi dasar dalam pelaksanaan monitoring, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan audit.

Sebelum adanya sistem, data pengelolaan kupon BBM belum tersimpan dalam satu basis data terpusat. Informasi mengenai pengambilan dan penggunaan kupon masih bergantung pada pencatatan manual sehingga memiliki risiko keterlambatan pembaruan data maupun kesalahan pencatatan.

Setelah implementasi Sistem Kupon BBM, pengelolaan data mengalami peningkatan melalui penyimpanan transaksi secara digital. Sistem mampu mencatat informasi penting, antara lain:

- identitas pegawai;

- kendaraan yang digunakan;
- jenis BBM;
- jumlah kupon;
- waktu transaksi;
- kode serah;
- bukti penggunaan BBM.

Ketersediaan data tersebut memberikan kemudahan bagi operator dalam melakukan monitoring dan pemeriksaan transaksi. Operator dapat mengetahui riwayat pengambilan, penggunaan kupon, serta kupon yang masih belum memiliki pertanggungjawaban.

Selain itu, adanya dokumentasi bukti penggunaan melalui foto dengan timestamp memberikan peningkatan terhadap aspek akuntabilitas karena transaksi tidak hanya berdasarkan catatan administratif, tetapi juga memiliki bukti pendukung.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat beberapa aspek tata kelola data yang dapat ditingkatkan. Sistem saat ini telah memiliki pencatatan transaksi, namun belum sepenuhnya menerapkan mekanisme audit trail yang mencatat seluruh aktivitas perubahan data oleh pengguna.

Pengembangan audit trail diperlukan agar setiap aktivitas penting dalam sistem dapat ditelusuri, seperti pengguna yang melakukan perubahan data, waktu perubahan, serta riwayat perubahan informasi.

Selain itu, integrasi data pegawai dengan sistem kepegawaian juga menjadi salah satu pengembangan yang diperlukan agar data pengguna selalu diperbarui secara otomatis dan mengurangi kebutuhan pengelolaan data secara manual.

3.4 Evaluasi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Kupon BBM merupakan salah satu bentuk layanan administrasi internal berbasis elektronik yang mendukung pelaksanaan tugas administrasi pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat.

Dari sisi pengguna, sistem menyediakan layanan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi layanan digital yang dapat diakses melalui perangkat komputer maupun smartphone tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan.

Pegawai sebagai pengguna utama dapat melakukan proses pengambilan kupon melalui sistem dengan memasukkan identitas, kebutuhan BBM, dan data kendaraan. Sistem kemudian melakukan validasi berdasarkan data pegawai yang tersedia sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan identitas.

Pada sisi operator, sistem menyediakan layanan administrasi untuk melakukan monitoring transaksi, pengelolaan stok kupon, pemeriksaan bukti penggunaan, serta pengawasan kupon yang belum dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil evaluasi, sistem telah memberikan peningkatan terhadap kemudahan layanan administrasi internal karena pengguna tidak lagi bergantung pada proses pencatatan manual. Selain itu, operator memperoleh akses informasi yang lebih cepat dalam melakukan pengawasan.

Namun, dari aspek layanan pengguna masih terdapat kebutuhan peningkatan, terutama dalam mendukung proses adaptasi pengguna baru. Sebagian pengguna masih membutuhkan sosialisasi agar memahami alur penggunaan sistem, khususnya terkait penggunaan kode serah dan pengunggahan bukti transaksi.

3.5 3.5 Evaluasi Keamanan dan Pengendalian Sistem

Keamanan informasi merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan SPBE untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.

Berdasarkan hasil evaluasi, Sistem Kupon BBM telah menerapkan beberapa mekanisme pengendalian dasar, antara lain:

1. Validasi identitas pengguna melalui Nomor Induk Pegawai (NIP).
2. Penggunaan akses khusus bagi operator untuk melakukan pengelolaan administrasi.
3. Penyimpanan data transaksi secara terstruktur dalam sistem.
4. Dokumentasi bukti penggunaan kupon melalui media foto dengan timestamp.

Mekanisme tersebut telah memberikan pengendalian terhadap proses distribusi dan penggunaan kupon BBM.

Namun, masih terdapat beberapa aspek keamanan yang dapat diperkuat, antara lain:

- Penerapan audit log aktivitas pengguna;
- Pengaturan hak akses yang lebih terperinci berdasarkan peran pengguna;
- Pelaksanaan backup data secara berkala;
- Pengujian keamanan sistem secara periodik.

Penguatan aspek tersebut diperlukan agar sistem dapat mendukung kebutuhan operasional jangka panjang serta meningkatkan kesiapan apabila dilakukan integrasi dengan sistem lainnya.

3.6 Evaluasi Efektivitas dan Dampak Implementasi

Implementasi Sistem Kupon BBM memberikan beberapa perubahan positif terhadap proses administrasi pengelolaan kupon BBM.

Perubahan utama yang terlihat adalah meningkatnya keteraturan pencatatan transaksi. Setiap proses pengambilan dan penggunaan kupon kini memiliki data digital yang dapat ditelusuri kembali.

Dari sisi efisiensi, sistem membantu mengurangi waktu yang diperlukan dalam proses pemeriksaan administrasi karena operator dapat melihat informasi transaksi secara langsung melalui sistem tanpa melakukan pencarian berdasarkan catatan manual.

Dari sisi transparansi, sistem memberikan informasi yang lebih jelas mengenai:

- siapa pengguna kupon;
- kapan kupon diambil;
- jumlah kupon yang digunakan;
- bukti penggunaan kupon.

Dari sisi akuntabilitas, adanya kode serah dan bukti penggunaan dengan timestamp memberikan penguatan terhadap proses pertanggungjawaban penggunaan kupon BBM.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala implementasi, yaitu:

1. Belum seluruh pengguna memiliki tingkat pemahaman teknologi yang sama.
2. Masih terdapat kemungkinan keterlambatan pengguna dalam melakukan pertanggungjawaban kupon.
3. Sistem masih bergantung pada koneksi internet.
4. Belum tersedia fitur analitik untuk membantu pimpinan dalam melihat pola penggunaan BBM.

3.7 Gap Analysis Implementasi Sistem Kupon BBM

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan.

Aspek Evaluasi	Kondisi Saat Ini	Kondisi Ideal	Gap
Proses bisnis	Proses pengelolaan sudah terdigitalisasi	Seluruh proses terintegrasi secara otomatis	Integrasi dengan sistem lain belum tersedia

Data transaksi	Data pengambilan dan penggunaan sudah tersimpan	Data memiliki audit trail lengkap	Belum tersedia pencatatan seluruh aktivitas perubahan
Data pegawai	Validasi menggunakan data pegawai sistem	Sinkronisasi otomatis dengan sistem kepegawaian	Belum terdapat integrasi SIMPEG
Monitoring	Operator dapat melihat transaksi dan kupon belum digunakan	Monitoring berbasis analitik	Belum tersedia dashboard analitik
Keamanan	Terdapat validasi pengguna dan akses operator	Pengamanan komprehensif	Perlu penguatan backup dan audit keamanan

3.8 Hasil Evaluasi Implementasi SPBE

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Sistem Kupon BBM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung penerapan SPBE melalui digitalisasi proses administrasi internal.

Implementasi sistem telah berhasil menyelesaikan permasalahan utama berupa keterbatasan pencatatan manual, kesulitan monitoring penggunaan kupon, serta kurang optimalnya proses pertanggungjawaban administrasi.

Sistem telah mendukung beberapa prinsip utama SPBE, yaitu:

1. **Efektivitas proses kerja**, melalui penyederhanaan alur administrasi.
2. **Transparansi**, melalui penyediaan riwayat transaksi dan bukti penggunaan.
3. **Akuntabilitas**, melalui pencatatan digital setiap transaksi.
4. **Pengendalian administrasi**, melalui monitoring stok dan kupon yang belum dipertanggungjawabkan.

Namun demikian, untuk meningkatkan tingkat kematangan implementasi SPBE, diperlukan pengembangan lanjutan pada aspek tata kelola data, integrasi sistem, keamanan informasi, audit trail, serta pemanfaatan data sebagai bahan analisis dan pengambilan keputusan.

Dengan demikian, Sistem Kupon BBM dapat dikategorikan sebagai salah satu implementasi digitalisasi proses kerja yang telah memberikan manfaat nyata bagi organisasi, namun masih memiliki ruang pengembangan agar mampu mencapai tata kelola digital yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi Sistem Kupon BBM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem telah memberikan perubahan positif terhadap proses pengelolaan administrasi kupon BBM melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Sebelum implementasi sistem, proses pengelolaan kupon BBM masih dilakukan secara manual sehingga pencatatan pengambilan dan penggunaan kupon belum terdokumentasi secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan proses monitoring, penelusuran transaksi, serta pemeriksaan pertanggungjawaban kupon membutuhkan waktu lebih lama karena masih bergantung pada catatan administrasi yang tersedia.

Setelah diterapkannya Sistem Kupon BBM berbasis web, proses pengelolaan kupon mengalami transformasi dari mekanisme manual menjadi proses digital yang lebih terstruktur. Sistem telah mampu mendukung proses pengambilan kupon, validasi identitas pegawai menggunakan NIP, pencatatan kendaraan dan jenis BBM, pengelolaan stok, penggunaan kode serah transaksi, serta dokumentasi bukti penggunaan BBM melalui foto dengan timestamp.

Berdasarkan evaluasi implementasi SPBE, Sistem Kupon BBM telah memberikan kontribusi dalam beberapa aspek utama, yaitu digitalisasi proses bisnis, peningkatan efektivitas administrasi, peningkatan transparansi transaksi, serta penguatan akuntabilitas pengelolaan kupon BBM.

Dari sisi proses bisnis, sistem telah berhasil mengurangi ketergantungan terhadap pencatatan manual dan menyediakan mekanisme kerja yang lebih terstruktur. Dari sisi tata kelola data, sistem telah menyediakan penyimpanan data transaksi secara digital sehingga riwayat pengambilan dan penggunaan kupon dapat lebih mudah ditelusuri. Dari sisi layanan administrasi, sistem memberikan kemudahan bagi pegawai dan operator dalam menjalankan proses pengelolaan kupon BBM.

Meskipun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan masih terdapat beberapa aspek yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas implementasi SPBE, antara lain penguatan audit trail, integrasi dengan sistem kepegawaian, pengembangan dashboard analitik, peningkatan mekanisme keamanan informasi, serta penyempurnaan fitur pendukung seperti notifikasi otomatis.

Secara keseluruhan, Sistem Kupon BBM telah menjadi salah satu bentuk implementasi digitalisasi proses kerja yang memberikan manfaat nyata bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat.

BAB V
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi Sistem Kupon BBM, diperlukan beberapa langkah pengembangan dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas sistem serta mendukung penerapan SPBE yang lebih optimal.

Rekomendasi pertama adalah melakukan penguatan tata kelola data melalui pengembangan fitur audit trail. Sistem saat ini telah mampu mencatat transaksi pengambilan dan penggunaan kupon, namun perlu ditingkatkan dengan mekanisme pencatatan aktivitas pengguna secara lebih lengkap, seperti pencatatan pengguna yang melakukan perubahan data, waktu perubahan, serta riwayat aktivitas sistem. Hal tersebut diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mendukung kebutuhan pemeriksaan atau audit di masa mendatang.

Rekomendasi kedua adalah melakukan integrasi data dengan sistem kepegawaian. Saat ini validasi pengguna telah dilakukan menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP), namun integrasi secara langsung dengan sistem kepegawaian akan meningkatkan kualitas data serta mengurangi kebutuhan pembaruan data secara manual. Dengan adanya integrasi, perubahan data pegawai seperti mutasi, perubahan unit kerja, maupun data pegawai baru dapat diperbarui secara lebih efektif.

Rekomendasi ketiga adalah pengembangan dashboard analitik penggunaan BBM. Selain berfungsi sebagai media administrasi dan monitoring transaksi, sistem dapat dikembangkan agar mampu menyajikan informasi statistik penggunaan BBM berdasarkan periode waktu, jenis BBM, kendaraan, maupun pengguna. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pendukung dalam melakukan evaluasi kebutuhan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan.

Rekomendasi keempat adalah penambahan mekanisme notifikasi otomatis. Sistem dapat dikembangkan untuk memberikan pengingat kepada pengguna yang telah mengambil kupon namun belum melakukan pertanggungjawaban penggunaan. Fitur tersebut dapat membantu meningkatkan kedisiplinan pengguna serta mengurangi jumlah kupon yang belum terselesaikan.

Rekomendasi kelima adalah penguatan aspek keamanan sistem melalui peningkatan pengelolaan hak akses pengguna, pelaksanaan pencadangan data secara berkala, serta evaluasi keamanan sistem secara periodik. Hal ini diperlukan untuk menjaga ketersediaan, integritas, dan keamanan data administrasi kupon BBM.

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, langkah yang dapat dilakukan meliputi:

1. Melakukan evaluasi sistem secara berkala berdasarkan kebutuhan pengguna dan perkembangan proses bisnis.
2. Melakukan sosialisasi penggunaan sistem kepada seluruh pengguna agar pemanfaatan fitur dapat berjalan secara optimal.
3. Melakukan pemeliharaan aplikasi dan basis data secara rutin untuk menjaga keberlangsungan sistem.
4. Melakukan pengembangan fitur secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan organisasi.
5. Melakukan penguatan tata kelola keamanan dan pengelolaan data sebagai bagian dari peningkatan kualitas penerapan SPBE.

Dengan adanya tindak lanjut tersebut, Sistem Kupon BBM diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan transaksi, tetapi dapat berkembang menjadi sistem pengelolaan administrasi yang lebih terintegrasi, informatif, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi Sistem Kupon BBM, terdapat beberapa aspek yang masih perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas penerapan SPBE, khususnya dalam penguatan tata kelola data, integrasi sistem, pengembangan fitur pendukung, peningkatan keamanan informasi, serta optimalisasi pemanfaatan data sebagai bahan monitoring dan pengambilan keputusan.

Untuk memastikan rekomendasi yang telah disusun dapat dilaksanakan secara terarah dan terukur, diperlukan rencana tindak lanjut yang memuat kegiatan prioritas, waktu pelaksanaan, output yang dihasilkan, serta pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Rencana tindak lanjut ini menjadi pedoman pengembangan Sistem Kupon BBM secara berkelanjutan agar mampu mendukung proses administrasi yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Matriks Rencana Tindak Lanjut Implementasi Sistem Kupon BBM

Adapun matriks rencana tindak lanjut implementasi Sistem Kupon BBM adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Output	PIC/Koordinasi
1	Evaluasi sistem dan identifikasi kebutuhan pengembangan berdasarkan proses bisnis serta masukan pengguna	TW IV 2026 dan berkala	Laporan hasil evaluasi sistem dan daftar kebutuhan pengembangan	Pengelola Sistem Kupon BBM / Bagian Tata Usaha
2	Inventarisasi dan dokumentasi data, fitur, serta komponen pendukung Sistem Kupon BBM	TW IV 2026	Dokumentasi sistem, database, fitur aplikasi, dan alur proses bisnis	Tim TI / Pengelola Sistem Kupon BBM
3	Pengembangan fitur audit trail untuk mencatat aktivitas pengguna dan perubahan data pada sistem	TW I-II 2027	Tersedianya riwayat aktivitas pengguna, log perubahan data, dan rekam jejak transaksi	Tim TI / Pengembang Sistem
4	Integrasi data pegawai dengan sistem kepegawaian untuk meningkatkan validasi dan pembaruan data pengguna	TW II-III 2027	Sinkronisasi data pegawai dan validasi pengguna secara otomatis	Tim TI / Pengelola Kepegawaian
5	Pengembangan dashboard analitik penggunaan BBM sebagai bahan monitoring dan pengambilan keputusan	TW III 2027	Dashboard penggunaan BBM berdasarkan periode, jenis BBM, kendaraan, dan pengguna	Tim TI / Pengelola Sistem / Pimpinan Unit

6	Implementasi fitur notifikasi otomatis terhadap kupon yang belum dilakukan pertanggungjawaban	TW III-IV 2027	Sistem pengingat/notifikasi kepada pengguna terkait kewajiban penyelesaian transaksi	Tim TI / Pengelola Administrasi
7	Penyusunan dan penerapan SOP pengelolaan Sistem Kupon BBM	TW IV 2026	Dokumen SOP pengelolaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem	Bagian Tata Usaha / Tim TI
8	Penguatan keamanan sistem melalui pengaturan hak akses, backup data, dan evaluasi keamanan berkala	Triwulanan	Laporan backup data, evaluasi keamanan, dan daftar hak akses pengguna	Tim TI / Administrator Sistem
9	Sosialisasi penggunaan sistem kepada pengguna dan evaluasi tingkat pemahaman pengguna	Semester I 2027 dan berkala	Dokumentasi sosialisasi dan hasil evaluasi kepuasan pengguna	Pengelola Sistem / Bagian Tata Usaha
10	Evaluasi pasca implementasi dan pengukuran efektivitas sistem	Semester II 2027	Laporan evaluasi implementasi SPBE dan rekomendasi pengembangan lanjutan	Tim Koordinasi SPBE / Bagian Tata Usaha

BAB VI
PENUTUP

Implementasi Sistem Kupon BBM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital proses kerja dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Penerapan sistem ini menunjukkan bahwa digitalisasi proses administrasi mampu memberikan perubahan terhadap cara kerja organisasi, khususnya dalam meningkatkan keteraturan pencatatan, kemudahan monitoring, transparansi transaksi, serta penguatan pertanggungjawaban penggunaan kupon BBM.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Sistem Kupon BBM telah memberikan manfaat dalam menyelesaikan permasalahan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Namun, penerapan sistem digital merupakan proses yang berkelanjutan sehingga diperlukan pengembangan dan penyempurnaan secara berkala agar sistem dapat terus menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Melalui evaluasi, rekomendasi, dan tindak lanjut yang telah disusun, diharapkan Sistem Kupon BBM dapat terus berkembang menjadi bagian dari ekosistem digital Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat yang mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

Dengan demikian, implementasi Sistem Kupon BBM tidak hanya menjadi solusi terhadap permasalahan administrasi kupon BBM, tetapi juga menjadi salah satu bentuk nyata penerapan transformasi digital dalam mendukung peningkatan kualitas layanan internal dan penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum.